BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdirinya Negara ini tidak hanya ditandai oleh Proklamasi dan keinginan untuk bersatu bersama, akan tetapi hal yang lebih penting adalah adanya UUD 1945 yang merumuskan berbagai masalah kenegaraan. Atas dasar UUD 1945 berbagai struktur dan unsur Negara mulai ada. Undang-undang dibuat harus sesuai dengan keperluan dan harus peka zaman, artinya aturan yang dibuat oleh para DPR kita sebelum di sahkan menjadi undang-undang sebelumnya harus di sosialisasikan dahulu dengan rakyat, apakah tidak melanggar norma-norma adat atau melanggar hak-hak asasi manusia. Salah satu bukti bahwa undang-undang yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi zamanya adalah undang-undang dasar 1945. Dengan mengalami empat kali perubahan yang masing-masing tujuanya tidak lain hanya untuk bisa sesuai dengan kehendak rakyat dan bangsa kita, dalam arti bisa mewakili aspirasi rakyat yang disesuaikan zamannya.

Dalam praktek bernegara pemerintahan, pembagian kekuasaan dalam Negara (sharing of power) merupakan suatu hal yang tak terelakan, bahkan pembagian kekuasaan itu tidak dapat dipisahkan dengan esensi hidup bernegara atau tujuan didirikannya Negara.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Suprastruktur dan Infrastruktur Politik ?
2. Bagaimana Lembaga – Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD NKRI Tahun 1945 ?
3. Bagaimana Tata Kelola Pemerintah Yang Baik ?
4. Bagaimana Partisipasi warga negara dalam sistem politik di indonesia ?

C. TUJUAN

1. Mengetahui Suprastruktur dan Infrastruktur
2. Mengetahui Lembaga – Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD NKRI Tahun 1945
3. Mengetahui Tata Kelola Pemerintah Yang Baik
4. Mengetahui Partisipasi warga negara dalam sistem politik di indonesia

BAB II
PEMBAHASAN

A. Suprastruktur Dan Infrastruktur Politik

1. Pengertian Suprastruktur

Suprastruktur politik adalah struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga lembaga negara yang ada, serta hubungan kekuasaan antara lembaga satu dengan yang lain.

Begitulah sekilas gambaran dari suprastruktur politik terutama yang berlaku di Indonesia.

Contoh Supratruktur Politik:

- adanya aturan yang menagtur hubungan antara lembaga negara.
- adanya struktur yang jelas dalam sistem politik

2. Suprastruktur Politik Indonesia

a. Eksekutif

Kekuasaan Suprastruktur Politik eksekutif berada di tangan presiden, kalau di Indonesia adalah kepala Negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan.

Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri–menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas–tugas pemerintahan sehari-hari. Presiden (dan Wakil Presiden) menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.

b. Legislatif

Suprastruktur Politik yang selanjutnya ialah Legislatif. Sistem perwakilan di Indonesia saat ini menganut sistem bicameral. Itu di tandai dengan adanya dua lembaga perwakilan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dengan merujuk asas trias politika, di Indonesia kekuasaan terbagi menjadi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Dalam hal ini, DPR dan DPD merepresentasikan kekuasaan legeslatif.

Kekuasaan legeslatif terletak pada, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Yang anggota-anggotanya terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

c. Yudikatif

Yang terakhir Suprastruktur Politik ialah Yudikatif. Suprastruktur Politik u ini yang satsangatlah vital perannya dalam penegakkan hukum di Indonesia. Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 UUD 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggrakan peradilan guna menegakkan hokum dan keadilan.

Infrastruktur Politik Indonesia

1.Partai Politik

Bagian Infrastruktur politik yang pertama ialah Partai politik. Partai politik Adalah organisasi yang mempunyai fungsi setidaknya terdapat 5 (lima) fungsi dasar sebagai partai politik yang berbadan hukum dan keberadaannya diakui oleh undang-undang

2.Interest Group

Bagian Infrastruktur politik selanjutnya ialah Interest Group . Interest Group Adalah kelompok masyarakat yang bergabung untuk kepentingan dan keuntungan warganya, kelompok ini tepatnya menampung saran, kritik dan tuntutan kepentingan bagi anggota masyarakat, serta menyampaikan kepada sistem politik yang ada. Kelompok ini sangat penting untuk menjadi

penyalur aspirasi masyarakat agar pemerintah mengerti apa yang diingankan oleh masyarakatnya.

3. Pressure Group

Bagian Infrastruktur politik yang ketiga ialah Pressure Group. Kelompok ini yang melontarkan kritikan-kritikan untuk para pelaku politik lain. Dengan tujuan membuat dunia perpolitikan menjadi maju. Karena perbaikan dari kekurangan-kekurangan yang disampaikan oleh para kritikus. Peran kelompok ini cukup vital dalam menanggapi kebijakan pemerintah. Peran kelompok ini pada dasarnya ialah demi kebaikan bangsa Indonesia . Namun terkadang disalahgunakan untuk kepentingan politik.

4. Media Of Political Communication

Bagian Infrastruktur politik yang satu ini sangat dekat dengan masyarakat. Benda mati yang sebagai perantara penyebar dan pemberitaan (singkat kata alat komunikasi politik). Contoh : tv, radio, internet, surat kabar, demo, dll. Peran Media politik sangat berpengaruh terhadap perpolitikan di Indonesia banyak sekali orang yang terpengaruh oleh kegiatan promosi oleh media politik. Biasanya Media Politik dijadikan sarana untuk pemebentukan asumsi masyarakat.

5. Journalism Group

Bagian Infrastruktur politik selanjutnya ialah Jurnalis. Kelompok yang membuat berita dan memberitakan hal-hal baru tentang politik. Mereka harus mengumpulkan informasi yang sebenar-benarnya dari sumber-sumber yang tajam dan terpercaya. Karena informasi ini lalu akan disebarluaskan kepada masyarakat agar masyarakat tau tentang perkembangan yang terjadi di dunia politik saat ini. Peran dari jurnalis juga sangatlah penting untuk membuat masyarakat mengerti apa yang dilakukan oleh pemerintah.

6. Student Group

Bagian Infrastruktur politik ialah Pelajar. Tapi tidak semua kelompok dalam bagian ini aktif dalam kegiatan politik . Kelompok ini biasanya Mahasiswa yang sedang belajar tentang politik di universitasnya, masing-masing kelompok ini biasanya sering mengkritik tentang keadaan politik Negara dengan berbagai cara. Ini mewakili peran anak muda dalam membangun bangsa. Oleh karena itu sering dihimbau agar mahasiswa menyampaikan aspirasi dengan "santun".

7. Political Figure

Bagian Infrastruktur politik ini sangat berpengaruh dalam sistem politik.Figur Politik ialah Orang-orang yang lalu-lalang atau yang bekerja didunia politik, dan exist di kalangan masyarakat, berperan penting dalam mengambil keputusan-keputusan yangb berpengaruh dalam suatu wilayah.

B. Lembaga – Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD NKRI Tahun 1945

Lembaga negara adalah institusi-institusi negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Sebelum amendemen UUD 1945, disebut lembaga tinggi negara dan hanya terdiri atas:

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI),
- Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia,
- Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI),
- Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia (DPA-RI), dan
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Setelah amendemen UUD 1945, disebut lembaga negara dan terdiri atas:

- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR)
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR)
- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD)
- Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia,
- Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA)
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK)dan
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK)

Pembubaran Dewan Pertimbangan Agung dikarenakan tidak efisiennya lembaga tinggi negara ini. DPA tidak memiliki kewenangan hukum atau politik dan hanya dapat memberikan saran kepada lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. DPA juga sering dihumorkan dengan istilah "Dewan Pensiun Agung" karena keanggotaanya terdiri dari pensiunan-pensiunan pejabat.

Sesuai dengan makna reformasi 1998, dan untuk menguatkan demokrasi, rakyat Indonesia menyadari pentingnya makna judicial review atau "hak pengkajian hukum oleh para ahli (hakim)" dan mempertimbangkan apakah tidaknya sebuah hukum bertentangan dengan undang-undang dasar/konstitusi negara.

Untuk menyuarakan kepentingan daerah-daerah/provinsi di Indonesia, dan sesuai dengan semangat reformasi dan demokrasi. Rakyat Indonesia mendirikan lembaga tinggi negara di bidang legislatif yang bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Lembaga ini berfungsi sebagai lembaga legislatif bikameral atau dua kamar di dalam legislatif. Kedudukannya DPD mirip dengan Senat Amerika Serikat karena mewakili aspirasi politik daerah-daerah. Perbedaan relatifnya Senat di Amerika Serikat lebih berkuasa daripada senat di Indonesia. Kekuasaan Senat di Amerika Serikat mirip dengan kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat.

C. Tata Kelola Pemerintah Yang Baik

1. Pengertian Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance merupakan sesuatu yang sangat diperhatikan oleh seisi dunia ini, terutama oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sudah menjadi tugas dan fungsi negara secara umum untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Setidaknya terdapat dua lembaga di bawah PBB yang memberikan definisi masing-masing terhadap frasa tata kelola pemerintahan yang baik tersebut.

United Nation Development Program (UNDP) atau lembaga PBB untuk pengembangan negara-negara di dunia, memberi makna terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu suatu latihan dari kewenangan ekonomi, kewenangan administrasi, dan kewenangan politik untuk mengatur masalah-masalah sosial negara tersebut. Dari pengertian menurut UNDP ini, terlihat tiga sektor utama dari kewenangan pemerintah yang pada akhirnya digunakan untuk sebesar-besar kepentingan rakyat. Yang dimaksud dengan masalah-masalah sosial pun dapat begitu bervariasi. Namun apa yang hendak dituju dari negara adalah kesejahteraan rakyatnya.

Di sisi lain, World Bank atau Bank Dunia sebagai suatu lembaga yang sering bersinggungan langsung dengan perekonomian dunia memberikan pemahaman tersendiri bagi kita terkait apa itu tata

kelola pemerintahan yang baik. Ia merupakan suatu penyelenggaraan sistem pengaturan pembangunan negara yang kuat dan bertanggung jawab dengan tetap beriringan dengan prinsip demokrasi dan prinsip pasar yang efisien. Selain itu, dalam tata kelola pemerintah yang baik akan terjadi penghindaran kesalahan dalam alokasi dana pembangunan dan dicegahnya korupsi di segala bidang. Good governance juga akan menjalankan anggaran secara disiplin sehingga aktivitas usaha rakyat dapat tumbuh dengan baik.

Berdasarkan pengertian tadi, kita dapat mengetahui bahwa tata kelola pemerintahan yang baik memiliki orientasi atau hal yang dituju. di bawah ini merupakan uraian lebih lanjut dari orientasi tata kelola pemerintahan yang baik:

1. Orientasi yang Ideal

Pada orientasi ini, negara diminta untuk mencapai tujuan nasional dengan bertitik tolak pada pengejawantahan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan beberapa unsur perwakilannya seperti legitimasi, pertanggungjawaban, penegakan HAM, otonomi daerah dan pembagian kekuasaan, juga jaminan kontrol sosial.

2. Pemerintahan yang Ideal

Maksud dari orientasi ini adalah pemerintah yang menjalankan fungsinya secara ideal harus melakukan upaya yang efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan nasional. Adanya orientasi ini tidak lepas dari sebaik apa kompetensi pemerintah dan sebaik apa struktur juga mekanisme politik dan sistem administratif negara yang berfungsi secara efektif dan efisien.

Ciri-Ciri Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Dengan mengetahui pengertian dari tata kelola pemerintahan yang baik kita dapat sedikit melihat ciri-ciri dari tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, sejatinya terdapat ciri-ciri lain yang khas dari tata kelola pemerintahan yang baik. Memahaminya menjadi penting agar kita dapat lebih waspada dengan jalannya pemerintahan di sekitar kita. Di bawah ini merupakan uraian lebih lanjut mengenai apa saja yang termasuk ke dalam kategori ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik:

1. Partisipasi Warga Negara yang Tinggi

Ciri pertama dari tata kelola pemerintahan yang baik yaitu tingginya peran serta warga negara dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Dengan adanya peran serta warga negara, maka jalannya pemerintahan akan lebih terkendali dan lebih memihak kepada kepentingan rakyat. Peran serta warga negara yang baik juga menjadikan turunnya tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme di berbagai bidang. Sejatinya, peran aktif warga negara akan menjadikan pemerintahan lebih bertanggung jawab dan merasa terawasi.

2. Supremasi Hukum yang Ditegakkan oleh Negara

Yang dimaksud supremasi hukum yaitu kekuasaan hukum serta norma-norma hukum yang menjadi dasar dari segala hal dan tetap memiliki prinsip berkeadilan. Negara dengan tata kelola

pemerintahan yang baik harus menegakkan hukum dengan adil tanpa memandang bulu. Hal tersebut akan membawa pengaruh positif terhadap tingkat keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Penegakkan hukum yang baik akan menghasilkan masyarakat yang taat hukum dan berani menindak ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya. Apabila hukum dicederai penegakkannya, maka bukan tidak mungkin apabila segenap warga negara menjadi berkurang kepercayaannya terhadap pemerintahan.

Baiknya Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan

Keterbukaan informasi di pemerintahan merupakan suatu faktor yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan. Dengan adanya keterbukaan atau transparansi dalam pemerintahan, maka rakyat dapat dengan bebas mengambil data terkait pemerintahan dan memberikan kritik juga saran demi kemajuan negara dengan berdasarkan data tersebut. Transparansi dalam penyelenggaraan kedaulatan rakyat juga akan memudahkan pengawasan yang dilakukan baik oleh lembaga legislatif ataupun lembaga yudikatif.

4. Respon yang Baik dari Aparatur Negara

Tidak dapat kita pungkiri bahwa dalam penyelenggaraan negara pemerintah berhubungan dengan banyak pihak yang terkait. Entah itu pihak asing ataupun pihak swasta dalam hal ekonomi atau pun organisasi non-pemerintah semacam LSM. Semua lembaga tersebut tentunya membutuhkan respons yang baik dari aparatur negara dalam hal pelaksanaan urusan mereka yang berkaitan dengan negara. adanya kesemua lembaga tersebut juga nantinya dapat memajukan negara, baik karena geraknya di bidang ekonomi ataupun di bidang sosial yang menjadi mitra pemerintah.

5. Pengalokasian Sumber Daya Negara yang Baik

Sumber daya yang dimaksud dalam tulisan ini dapat berupa sumber daya manusia, baik rakyat maupun aparatur negara. selain itu, sumber daya alam dan budaya juga termasuk ‘harta’ yang dimiliki oleh suatu negara. maka dari itu, penggunaan sumber daya negara dengan efektif dan efisien menjadi salah satu ciri yang paling menonjol dari tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil dari alokasi sumber daya negara yang baik dapat terlihat dari majunya sektor pemerintahan, sektor perekonomian, sektor budaya, dan kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat. Apabila yang terjadi adalah hal yang sebaliknya, maka bisa jadi negara tersebut belum memiliki tata kelola pemerintahan yang baik.

6. Pertanggungjawaban Pemerintah yang Jelas

Dalam melaksanakan tugasnya untuk menjalankan pemerintahan, maka pemerintah harus rutin untuk memberikan laporan pertanggungjawabannya untuk selanjutnya dievaluasi oleh rakyat atau secara lebih khususnya dewan perwakilan rakyat. Salah satu tugas dan fungsi DPR adalah mengawasi dan meminta pertanggungjawaban presiden dalam wadah MPR bersama DPD. Pertanggungjawaban pemerintah pun harus dilakukan dalam rentang waktu yang tidak berjauhan agar segenap rakyat mengetahui kinerja dari aparatur negara.

7. Memiliki Visi Pembangunan yang Luas

Salah satu ciri tata kelola pemerintahan yang baik adalah sistem pemerintahan tersebut memiliki visi pembangunan negara yang luas. Yang dimaksud dengan visi pembangunan yang luas sendiri yaitu suatu tujuan pembangunan dipertimbangkan secara matang dan mendalam serta mempertimbangkan aspek kemajuan zaman dalam menentukan tujuan pembangunan tersebut. Nantinya, visi pembangunan tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintahan untuk merumuskan kebijakan publik yang berkeadilan dan merakyat. Selain itu, visi pembangunan juga menjadi dasar untuk mengevaluasi jalannya pemerintahan. Dalam kasus negara Indonesia, yang menjadi dasar visi pembangunan adalah nilai-nilai dasar Pancasila.

8. Tingginya Orientasi Terhadap Tujuan Bersama

Suatu negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik akan memiliki orientasi yang tinggi untuk kepentingan bersama. Tata kelola pemerintahan harus dapat menjadi sarana dari kepentingan yang berbeda agar diperoleh pilihan yang berkeadilan dan menuju kepentingan bersama. Adanya orientasi yang tinggi terhadap tujuan bersama akan meningkatkan persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat. Hal ini akan menjadikan ketertiban dan keamanan segenap warga negara menjadi lebih mudah untuk dijaga.

Itulah artikel mengenai ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik yang dapat penulis sampaikan dalam kesempatan ini. Mempelajari karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik penting untuk kita lakukan karena dengan mengetahui hal tersebut kita dapat mendeteksi apakah tata kelola pemerintahan di Indonesia sudah baik ataukah masih terdapat banyak kekurangan. Apabila memang masih terdapat banyak kekurangan, maka kita dapat mengkritisi hal tersebut kepada pemerintah melalui berbagai cara. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain, semoga sukses selalu bagi para pembaca.

D. Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia

Peran serta dalam sistem politik lazimnya disebut dengan partisipasi politik. Partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang/sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Definisi partisipasi politik salah satunya dikemukakan oleh Verba, yang mengungkapkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.

Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk memengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah, agar keputusan tersebut menguntungkannya.

Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitas. Hal ini menyebabkan bervariasinya partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara dari mulai tingkatan yang pasif sampai pada tingkatan yang aktif. Bila dihubungkan dengan hak dan kewajiban warga negara, partisipasi politik meruapakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab warga negara yang berkesadaran politik tinggi dan baik.

Partisipasi politik yang baik akan terwujud dalam masyarakat politik yang sudah mapan. Suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

1. Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah.
2. Memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat.

3. Memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan.
4. Memilki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat.
5. Memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja.
6. Dapat menerima perbedaan pendapat.
7. Memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa.
8. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan dan keadaan negara dan bangsanya.
9. Memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan perumusan penentuan kebijakan negara, mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dalam berbagai bidang kehidupan.
10. Menyadari akan pentingnya pembelaan terhadap negara, kedaulatan, keberadaan dan keutuhan negara memahami, menyadari dan melaksanakan sikap dan perilaku yang seseuai dengan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga negara.
11. Patuh terhadap hukum dan menegakkan supremasi hukum.
12. Membangun budaya politik yang demokratis.
13. Menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, keadilan dan persamaan.
14. Mengawasi jalannya pemerintahan agar tertata dengan baik.
15. Memiliki wawasan kebangsaan, sikap dan perilaku yang mencerminkan cinta tanah air.

Berdasarkan karakteristiknya, masyarakat politik berkedudukan sebagai masyarakat yang menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan kekuasaan negara, baik sebagai penyelenggara kekuasaan negara maupun sebagai pengawas pelaksanaan kekuasaan negara, dalam bentuk institusi formal (DPR) ataupun informal (partai politik, kelompok kepentingan dan kelompok penekan).

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan berjalan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem politik meliputi tiga institusi pokok, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Lembaga-lembaga yang berada dalam satu sistem pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia.

Dalam sistem pemerintahan negara republik, lembaga-lembaga negara itu berjalan sesuai dengan mekanisme demokratis, sedangkan dalam sistem pemerintahan negara monarki, lembaga itu bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip yang berbeda.

B. Saran

Dalam hal ini Presiden dan Menteri Negara merupakan bagian yang paling berperan dalam kekuasaan pemerintahan Negara. Maka dari itu Presiden harus bisa mengambil keputusan yang tepat dalam pembuat kebijakan kekuasaan, karena keputusan tersebut tentunya akan memiliki peranan besar dalam Pembangunan di daerah-daerah di Indonesia. Sistem pemerintah harus saling bekerja sama membangun Indonesia agar indonesia lebih sejahtera dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Unsur-unsur demokrasi yang kadang menjadi akar permasalahan harus bisa diselesaikan dan diperbaiki, karena konsep demokrasi bukan hak paten yang tidak bisa diubah. Ia harus bersifat dinamis dan bisa mengikuti kultur sosial-politik-budaya Negara yang menggunakannya sebagai asas Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Asa Generasiku.2012. Lembaga – Lembaga Negara, Fungsi dan Tugasnya.
- http://asagenerasiku.blogspot.co.id/2012/04/lembaga-lembaga-negara-negara-fungsi-dan.html.
- Diakses pada 15 Februari 2017 pada pukul 21.00 wita.
- Bidadari Surga.2013. Tata Kelola Pemerintah Yang Baik dan Bersih (GOOD AND CLEAN GOVERNANCE).
- http://mutiarabidadarisurga.blogspot.co.id/2013/04/tata-kelolapemerintahan-yang-baik-dan.html . Di akses pada 20 April 2017 pada pukul 17.15 wita.
- Blogger. 2015. Penyerangan Tanjung Priok. www.blogger.com.
- Budiyanto. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta:Erlangga.
- Desbayy.2015.Makalah Sistem Kelembagaan Negara menurutUUD 1945.
- http://desbayy.blogspot.co.id/2015/05/makalah-sistem-kelembagaan-negara.html.
- Di akses pada 10 Febuari 2017 pada pukul 20.00 wita.
- Dradioqu. 2015. Sebanyak 885 lembar materai palsu diamankan anggota Reserse
- www. DradioQu.com. Di akses pada 10 Febuari 2017 pada pukul 21.00 wita.
- Hargo Widyanto.2014. Peran Serta Warga Negara Dalam Sistem Politik Coretan Ringan.
- https://www.facebook.com/notes/hargo-widyanto/peran-serta-warga-negara-dalam-sistem-politik-coretan-ringan/681717051865901/.
- Di akses pada 20 Febuari 2017 pada pukul 20.30 wita.
- Suprihatini, Amin dan Yudi Suparyanto. 2010. Pendidikan Kewarganegaraan. Klaten: Intan Pariwara.
- Garnis, dan kawan-kawan. 2016. Menjaga Keutuhan Negara Dalam Naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makalah dipresentasikan pada Kelompok Munir, Tanjung Selor.
- Males. 2015. Tanjung Priok Pelabuhan Terbesar di Jakarta. www.malesbanget.com. Di akses pada 10 Febuari 2017 pada pukul 20.30 wita.
- Merdeka. 2014. Pembakaran Bus oleh Masa. www.merdeka.com. Di akses pada 10 Febuari 2017 pada pukul 20.45 wita.
- Sudarsono.2007. Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.

- Suprihatini, Amin dan Yudi Supryanto. 2010. Pendidikan Kewarganegaraan. Klaten: Intan Pariwara.
- Wikipedia.2017. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Daerah_Republik_Indonesia.
- Di akses pada 21 Febuari 2017 pada pukul 19.55 wita.